

Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT

*Impact Of Regional Autonomy On Fiscal Capacity
In The District Of Timor Tengah Utara, Ntt Province*

Kamilaus Konstase Oki

tanceki@yahoo.co.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor

Abstract

Regional autonomy is an independence right given by the central government to the regions to take care of the interests of the community. The impact of regional autonomy is to create fiscal capacity independence as the basic capital of regional development. The fiscal capacity of In the District of North Central Timor originates from Regional Original Income, balancing funds, and other legitimate regional income. The problem in this study is to find out how much the impact of regional autonomy on the fiscal capacity. This study aims to measure fiscal capacity capabilities. The study was conducted in the District of North Central Timor using a quantitative descriptive approach. The results of the analysis show that the average level of regional independence in the relationship pattern is in the instructive category, meaning that regional financial capacity is very low in financing the implementation of regional development.

Keywords: *Regional autonomy, fiscal capacity.*

Abstrak

Otonomi daerah merupakan hak kemandirian yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus kepentingan masyarakat. Dampak otonomi daerah adalah menciptakan kemandirian kapasitas fiskal sebagai modal dasar pembangunan daerah. Kapasitas fiskal kabupaten Timor Tengah Utara berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar dampak otonomi daerah terhadap kapasitas fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kapasitas fiskal. Penelitian dilakukan di kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil analisa menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian daerah dalam pola hubungan masuk kategori instruktif, artinya kemampuan keuangan daerah adalah rendah sekali dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.

Kata Kunci: Otonomi daerah, kapasitas fiskal.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah pusat memberikan otonom secara luas dan bertanggung jawab kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Semenjak diberikan hak otonom oleh pemerintah pusat pada Januari 2001, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksud untuk dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya secara adil serta adanya perimbangan antara pusat dan daerah.

Otonomi daerah luas diberikan pada daerah bertujuan untuk menciptakan kapasitas fiskal yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena pada otonomi daerah pemerintah menyediakan regulasi sebagai dasar pijak daerah berkreasi memanfaatkan potensi sumber daya secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Leiwakabessy(2006), suksesnya program pembangunan daerah memerlukan suatu sistem pendanaan pembangunan daerah yang memanfaatkan potensi dan mampu menciptakan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya. Dengan demikian maka dampak otonomi daerah adalah menciptakan kemandirian kapasitas fiskal sebagai modal dasar pembangunan daerah.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai daerah otonom, pelaksanaan pembangunan terselenggara dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi daerah sendiri, pemerintah pusat serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber keuangan daerah kabupaten Timor Tengah Utara berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum merupakan sumber penerimaan yang kontribusinya paling besar. Setiap tahun rata-rata 90 persen sumber dana berasal dari pemerintah pusat, sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih minim kontribusinya.

Dampak dari otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam undang-undang otonomi daerah adalah menciptakan kemandirian kapasitas fiskal. Daerah otonom diberi ruang yang cukup untuk berkreasi memanfaatkan potensi sumber daya secara maksimal. Untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan rasio pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan total pendapatan daerah dan rasio bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat dan provinsi dengan total penerimaan daerah. Semakin besar rasio kontribusi maka mencerminkan semakin besar kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan pelaksanaan pembangunan ataupun sebaliknya. Artinya keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; seberapa besar dampak otonomi daerah terhadap kapasitas fiskal kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kapasitas fiskal. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, dan sebagai bahan informasi awal untuk penelitian lanjutan khususnya tentang keuangan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di kabupaten Timor Tengah Utara, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data dan informasi, diuji dan dianalisis secara deskriptif dalam rangka menjawab permasalahan

penelitian. Penelitian dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, berbagai situasi dan variabel yang timbul (Burhan, 2004).

Lokasi penelitian ini adalah pada Dinas Pendapatan daerah, Bagian Keuangan, dan BPS Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang dikumpulkan adalah dari dokumen-dokumen tentang sumber penerimaan dan pengeluaran daerah dari instansi terkait dan untuk mendukung informasi yang diperoleh maka dilakukan wawancara. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif. Selanjutnya adalah mengolah data yang telah tersedia. Penggunaan metode analisa untuk menjawab tujuan tersebut dengan menghitung kapasitas fiskal. Perhitungan kapasitas fiskal dengan menggunakan rumus :

$$KF = \frac{PDRB / \Sigma Penduduk}{KFs} \times 100 \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

$$KFs = \frac{\Sigma PDRB / Jumlah Penduduk}{Jumlah Kecamatan} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

- KF = Kapasitas Fiskal
- KFs = Kapasitas Fiskal Standar
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Kemudian untuk mengukur potensi atau Kapasitas Fiskal sebelum otonomi dan masa otonomi adalah dengan menggunakan variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum dan variabel dummy yang digunakan dalam model regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4D + e \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan :

- Y = Kapasitas Fiskal
- X₁ = PDRB
- X₂ = Jumlah Penduduk
- X₃ = Dana Alokasi umum
- X₄ = Dummy
 - D = 0 Sebelum Otonomi Daerah
 - D = 1 Dalam Otonomi Daerah
- a = Konstanta regresi atau intersep
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi
- e = Error

- a) Persamaan Regresi digunakan untuk menentukan perbedaan kapasitas fiskal.
- b) Melakukan Uji-t (uji parsial) $\alpha=0,5$, dengan membandingkan nilai t (t-hitung) dengan t-tabel. Adapun t-hitung dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$t \text{ hitung} = \frac{b x}{Se}$$

Keterangan :

B_x = Koefisien Regresi

Se = Standar Error

Dalam uji t, hipotesis statistik yang diuji adalah :

H0 = Tidak ada pengaruh antara PDRB dengan Kapasitas Fiskal, antara Jumlah Penduduk dengan Kapasitas Fiskal dan antara Dana Alokasi Umum dengan Kapasitas Fiskal.

H1 = Ada pengaruh antara PDRB dengan Kapasitas Fiskal, antara Jumlah Penduduk dengan Kapasitas Fiskal dan antara DAU dengan Kapasitas Fiskal.

c) Melakukan Uji-F (secara simultan) dengan menggunakan derajat keyakinan 95% atau $\alpha=0,5$, maka hasil perhitungan F (F-hitung) kemudian dibandingkan dengan F-tabel. Dalam uji-F, hipotesis yang diuji adalah :

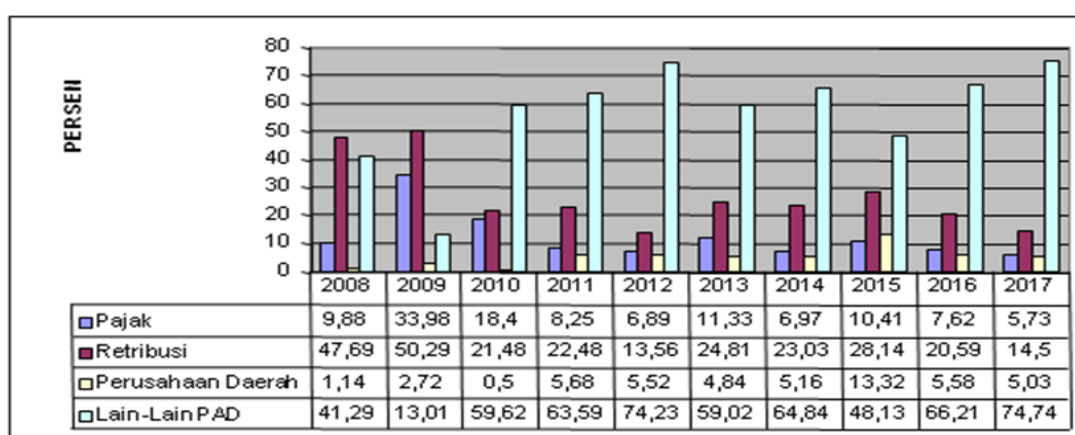
HO = Secara bersama - sama atau simultan tidak ada Pengaruh antara variabel PDRB, Jumlah Penduduk dan DAU terhadap Kapasitas Fiskal.

H1 = Secara bersama-sama atau simultan ada pengaruh antara variabel PDRB, Jumlah Penduduk dan DAU terhadap Kapasitas Fiskal.

d) Melakukan Uji-determinasi (R^2), untuk melihat seberapa besar variabel kemampuan keuangan daerah diterangkan oleh variabel PDRB, Jumlah Penduduk, DAU. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1.

Pembahasan

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dari Pendapatan Asli Daerah dihitung berdasarkan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah, Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak, dengan Total Pendapatan Daerah, serta Bantuan dan Sumbangan, pemerintah pusat dan propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Total Pendapatan Daerah.



Grafik 1.1. ontribusi Sumber-Sumber Penerimaan PAD Kabupaten TTU

Sumber-sumber pembentuk Pendapatan Asli Daerah kabupaten Timor Tengah Utara dari sektor pajak daerah rata-rata 10,12 persen per tahun. Perkembangan penerimaan sektor pajak daerah berfluktuatif naik turun dari waktu ke waktu. Penerimaan dari hasil retribusi daerah, rata-rata 26,66 persen per tahun. Prosentase penerimaan tertinggi dari sektor retribusi daerah adalah 50,29 persen dan terendah 13,56 persen. Seperti halnya sektor pajak daerah, perkembangan penerimaan dari retribusi daerah juga berfluktuatif dari tahun ke tahun. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan (bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah) merupakan penerimaan yang kontribusinya minim rata-rata 4,95 persen per tahun. Prosentase terendah 0,50 persen dan tertinggi 13,32 persen. Lain dengan tiga sektor penerimaan terdahulu, prosentase penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber penerimaan dominan kontribusinya pada pembentukan Pendapatan Asli Daerah rata-rata 56,47 persen per tahun.

Tidak optimalnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah pada periode otonomi daerah disebabkan oleh karena kurang optimalnya upaya pemerintah daerah dalam memantau potensi melalui upaya pembaharuan data dan inventarisir obyek dan subyek sumber penerimaan, kurang efektif dan profesionalnya sistem pemungutan serta terbatasnya obyek dan subyek pajak. Selain itu, faktor lain adalah adanya pengalihan pengelolaan sebagian sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah potensial pada pemerintah pusat dan propinsi. Hal ini terlihat dari perbedaan prosentase penerimaan dari pajak dan retribusi daerah sebelum dan periode otonomi daerah.

Kontribusi pajak dan retribusi daerah memiliki peran penting terhadap total penerimaan, namun pada satu sisi belum optimalnya pemerintah daerah. Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah melalui intensifikasi berupa:

1. Penerapan upaya intensifikasi pendataan melalui pelaksanaan pengawasan atas obyek dan subyek Pendapatan Asli Daerah dengan senantiasa dilakukan pembaharuan pendataan dari waktu ke waktu.
2. Penetapan tarif perlu dilakukan penyesuaian melalui mekanisme persidangan DPRD dan ditetapkan dalam satu aturan.
3. Sosialisasi kepada masyarakat luas dilakukan secara kontinyu dengan pendekatan penyuluhan dalam rangka menyadarkan masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pajak dan retribusi daerah.
4. Melakukan perhitungan secara efisien dan efektifitas sistem pemungutan dengan melakukan upaya penekanan biaya pemungutan seminimal mungkin.
5. Pengawasan secara melekat instansi terkait dan pemerintahan kecamatan setiap tahun terhadap obyek dan subyek pajak dan retribusi potensial.

Retribusi daerah yang kontribusinya rata-rata 26,66 persen per tahun seyogyanya bisa memberikan sumbangan yang lebih besar lagi, namun dari hasil penelitian masih belum terealisirnya beberapa sumber retribusi potensial semenjak digulirkannya otonomi daerah. Seperti retribusi Perusahaan Daerah Air Minum, retribusi parkir kendaraan bermotor, dan retribusi bahan galian golongan C pada titik tertentu belum diberlakukannya pemungutan.

Peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan untuk sisi pengeluaran daerah yang makin meningkat dalam rangka membiayai kebutuhan pelayanan pembangunan. Untuk menyeimbangkan penerimaan daerah dengan pengeluaran, diperlukan tambahan subsidi dari pemerintah pusat. Dari hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah yang nampak dalam komulatif Pendapatan Asli Daerah dengan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, maka dapat dilihat pola hubungan dengan pemerintah pusat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah
Kabupaten TTU

NO	TAHUN	KEMANDIRIAN (%) (%PPAD + %PBHPBP)	KEMAMPUAN KEUANGAN	POLA HUBUNGAN
1	2008	7,71	Rendah Sekali	Instruktif
2	2009	9,49	Rendah Sekali	Instruktif
3	2010	8,60	Rendah Sekali	Instruktif
4	2011	10,00	Rendah Sekali	Instruktif
5	2012	10,33	Rendah Sekali	Instruktif
6	2013	8,70	Rendah Sekali	Instruktif
7	2014	10,50	Rendah Sekali	Instruktif
8	2015	9,65	Rendah Sekali	Instruktif
9	2016	10,12	Rendah Sekali	Instruktif
10	2017	9,52	Rendah Sekali	instruktif
RATA-RATA		9,46	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. TTU (diolah). 2019

Kemampuan keuangan daerah merupakan komulatif prosentase peran PAD dengan presentase peran BHPBP, terlihat bahwa tingkat kemandirian fluktuatif naik turun prosentasenya. Hal tersebut disebabkan oleh naik turunnya kontribusi PAD dan BHPBP terhadap total penerimaan dari tahun ke tahun. Semenjak diberlakukan otonomi daerah, tingkat kemandirian kabupaten Timor Tengah Utara dalam membiayai pelaksanaan pembangunan masih minim. Rata-rata tingkat kemandirian daerah adalah 9,33 persen.

Karena rata-rata tingkat kemandirian daerah kabupaten Timor Tengah Utara adalah 9,46 persen. Menurut Paul Hersey dan Kenneth (1989), pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah pola hubungan instruktif dimana kategori prosentasenya dibawah 25 persen. Artinya kemampuan keuangan daerah kabupaten Timor Tengah Utara adalah rendah sekali dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hak otonomi yang diterima pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara belum sepenuhnya dijalankan secara mandiri dan bertanggung jawab. Karena rendahnya kemampuan keuangan dan urusan pembiayaan tersebut masih didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat.

Selanjutnya dilakukan pembuktian lebih lanjut dengan menggunakan uji statistik. Uji t digunakan untuk melihat hubungan variabel-variabel independent secara parsial terhadap variabel dependent dan uji F untuk simultan. Pengambilan kesimpulan signifikan tidaknya adalah dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Cara lainnya adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Suatu variabel dianggap signifikan atau berpengaruh terhadap variabel dependennya apabila mempunyai nilai t-hitung lebih tinggi daripada t-tabel yang digunakan (dalam penelitian ini adalah 5 persen atau 0,05).

Dari hasil analisa, menunjukkan bahwa konstanta memiliki nilai statistik sebesar - 1,516 lebih kecil daripada t-tabel 1,78, maka konstanta yang dimasukkan dalam model ini tidak signifikan terhadap variabel dependen atau kapasitas fiskal. Sedangkan t-hitung variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_1) adalah sebesar 3,158 lebih besar daripada t-tabel 1,78, maka variabel PDRB yang dimasukkan dalam model ini adalah signifikan atau secara parsial berpengaruh pada variabel Kapasitas Fiskal. Ini mengandung makna bahwa kenaikan PDRB akan mempengaruhi peningkatan kapasitas fiskal daerah dan juga PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kapasitas fiskal daerah. PDRB yang terdiri dari tiga sektor dengan sembilan sub sektor, merupakan modal pembentukan kemampuan atau kapasitas fiskal daerah.

Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa t-hitung dari variabel jumlah penduduk (X₂) adalah 1,540 dan t-tabel 1,78, hubungannya tidak signifikan. Karena nilai t-statistik lebih rendah dari t-tabel maka ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal. Hal ini mengandung makna bahwa apabila terjadi tambahan jumlah penduduk sedangkan variabel lain dianggap konstan, maka tidak akan mempengaruhi kapasitas fiskal.

Faktor penduduk selalu menjadi suatu permasalahan yang menarik oleh karena mempunyai kaitan erat dengan tingkat penerimaan daerah. Perkembangan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan persediaan resources yang memadai maka jumlah penduduk akan menjadi beban bagi pembangunan. Sebaliknya percepatan pertumbuhan penduduk dibarengi dengan kualitas yang memadai akan menjadi modal pembangunan yang berharga. Menurut Abas (2002), daerah yang dengan tinggi populasi penduduk merupakan potensi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Artinya jika jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang diperoleh meningkat. Dari hasil analisa, hubungan parsial jumlah penduduk dengan kapasitas fiskal di kabupaten Timor Tengah Utara adalah tidak signifikan. Tidak signifikannya hubungan tersebut disebabkan oleh karena jumlah komposisi penduduk terbesar kabupaten Timor Tengah Utara adalah penduduk yang berusia antara 0-25 tahun rata-rata 62 persen dan diatas 60 tahun rata-rata 7 persen. Artinya sebagian besar penduduk masih berada dalam usia bukan angkatan kerja ataupun dalam usia angkatan kerja namun masih berada dalam bangku pendidikan mulai dari SLTA sampai pada perguruan tinggi. Dari formulasi perhitungan penerimaan dana alokasi, dilibatkan sebagai potensi tetapi dari sisi produktifitas tidak nampak oleh karena tidak sedang bekerja.

Tabel 1.2
Hasil Model Regresi Kapasitas Fiskal Kabupaten TTU

HUBUNGAN PARSIAL					
Variabel	Koefisien Variabel	t-Statistik	t-Tabel	Sig.	Kesimpulan
Konstanta	-55795,604	-1,516	1,78	0,190	Tdk Signifikan
PDRB (X ₁)	0,002	3,158	1,78	0,031*	Signifikan
Penduduk (X ₂)	317,278	1,540	1,78	0,184	Tdk Signifikan
DAU (X ₃)	0,081	3,138	1,78	0,026*	Signifikan
Dummy (D)	-7009,516	-2,618	1,78	0,047*	Signifikan
Variabel	Koefisien Variabel	F-Statistik	F-Tabel	Sig.	Kesimpulan
PDRB, Penduduk, DAU	0,002, 317,278, 0,081	31,816	5,19	0,000*	Signifikan
KOEFSISIEN DETERMINASI					
R ²	0,674				

Sumber : Data diolah. 2019

Uji F digunakan untuk melihat hubungan variabel-variabel independent secara simultan atau secara bersamaan terhadap variabel dependent. Pengambilan kesimpulan signifikan tidaknya adalah dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel pada taraf signifikansi yang digunakan (5 persen atau 0,05). Kesimpulan hubungan tersebut adalah signifikan ketika F-hitung lebih besar dari F-tabel pada taraf signifikansi 5 persen atau 0,05, artinya ada hubungan pengaruh variabel independent / bebas secara bersama terhadap variabel terikat. Sebaliknya tidak signifikan ketika F-hitung lebih kecil daripada F-tabel pada

tingkat signifikansi yang digunakan yakni 5 persen atau 0,05. Cara lainnya adalah dengan melihat nilai signifikansinya.

Dari uji F, nilai F-hitung adalah sebesar 31, 816 dan F-tabel sebesar 5,19. Artinya nilai F-hitung lebih besar daripada F-tabel. Dengan demikian, mengartikan bahwa secara bersama-sama variabel independent berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan pengertian lain, variabel PDRB, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum secara bersama memiliki hubungan yang signifikan dengan kapasitas fiskal.

Uji-determinasi (R^2) adalah untuk melihat seberapa besar variabel Kapasitas Fiskal diterangkan oleh variabel PDRB, Jumlah Penduduk dan Dana Alokasi Umum serta otonomi daerah. Nilai Koefisien Determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai R^2 berarti semakin besar variasi variabel dependent yang dijelaskan oleh variabel independent. Sebaliknya semakin kecil nilai R^2 maka semakin kecil variasi variabel dependent yang dijelaskan oleh variabel independent. Hasil pengujian nilai R^2 adalah sebesar 0,674. Ini menunjukkan bahwa 67 persen variasi dari variabel kapasitas fiskal dipengaruhi oleh variasi dari variabel-variabel dalam model yaitu variabel Produk Domestik Regional Bruto, variabel Jumlah Penduduk, variabel Dana Alokasi Umum. Sedangkan sisanya sebesar 33 persen variasi dalam variabel kapasitas fiskal daerah dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam model atau persamaan regresi ini.

Simpulan

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terlihat dalam Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak masih sangat kecil kontribusinya. Rata-rata kemampuan keuangan daerah adalah rendah. Artinya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara pada pemerintah pusat adalah cukup tinggi. Penyebab utama ketidakmampuan keuangan daerah kabupaten Timor Tengah Utara adalah karena sumber penerimaan yang dikelola pemerintah daerah adalah sumber penerimaan yang dilihat dari subyek dan obyek sangat kurang.

Kebutuhan fiskal dalam pelaksanaan pembangunan dikabupaten Timor Tengah Utara dari waktu ke waktu semakin bertambah. Rata-rata kebutuhan fiskal pada masa otonomi daerah lebih besar dari sebelum otonomi daerah. Artinya tingkat kebutuhan pemerintah daerah semakin kompleks dijamin otonomi daerah, baik untuk membiayai kegiatan rutin ataupun untuk belanja modal/investasi.

Pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Utara dalam menjalankan roda pembangunan, dihadapkan pada suatu dilematis penyediaan pembiayaan. Pada satu sisi, kebutuhan fiskal daerah sangat besar namun pada sisi lain, ketersediaan kapasitas fiskal sangat rendah dan terbatas. Artinya terjadi kesenjangan fiskal atau fiskal gap yang cukup besar. Otonomi daerah pada hakekatnya menuntut adanya kemandirian daerah dalam menyediakan kapasitas fiskal untuk memberikan keseimbangan kebutuhan fiskal.

Dampak Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat terkesan terlalu cepat tanpa adanya suatu kesiapan matang terlebih dahulu baik dari pemerintah pusat sebagai pemberi hak otonomi maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana. Hasilnya adalah daerah otonom hanya merupakan suatu predikat atau label dan hanya sebatas otonom administratif, namun hakekat otonomi sebenarnya yakni kemandirian fiskal tidak tercapai.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2018. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara*.
- Anonim, 2006. Timor Tengah Utara Dalam Angka 2018.
- Armayani, 2004. *Analisis Anggaran Belanja Pembangunan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan*. UPP AMP YNPN Yogyakarta. Hal. 231-240.
- Aswarodi, 2002. *Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan UU 25 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan*. Hal. 33-43.
- Aswadi, Hairul, 2004. *Analisa Implementasi Perimbangan Keuangan*. UPP AMP YNPN Yogyakarta. Hal. 45-64.
- Bastian, Indra, 2006. *Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah: Suatu Paradoks*. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Burhan, Bungin, 2004. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kumunikasi, EkonomidanKebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya)*. Edisi Pertama, Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2007. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)*. Penerbit PT INDEKS. Cetakan Pertama.
- Dedi, Ramdan Ruhedi, 2004. *Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah*. UPP AMP YNPN Yogyakarta. Hal. 105-112.
- Dewi, I Gusti Ayu Rima Kusuma, 2004 . *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit (UPP) AMP YNPN Yogyakarta.
- Elmi Bacrul, 2002. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya Dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom*. Kajian ekonomi dan keuangan Vol. 6, No.4. Forum Dosen Sektor Publik, 2006. *Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit BPFE UGM-Yogyakarta. Cetakan Pertama.
- Halim, Abdul, 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Kifliansyah, 2004. *Analisa Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)*. (UPP) AMP YNPN Yogyakarta. Hal 329-338.
- Khusaini, Muhammad, 2006. *Ekonomi Publik (desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah)*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Kuncoro, Mudrajat., 1995. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Prisma edisi 4.
- Lesminingsih, Sri, 2004. *Analisis Peningkatan Belanja Rutin Daerah.(Kasus kab. Tolitoli)*. UPP AMP YNPN Yogyakarta. Hal. 221-230.
- Leiwakabessy, H. Yvonny dkk, 2006. Rasio Kemandirian : Ketergantungan Penerimaan,Dari Luar. Forum Dosen akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Lavrov, Aleksei, John M. Litwack, Douglas Sutherlan, (2000). *Fiscal Federalist in Russia : A Case For Substitutional Autonomy*, paper, Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Mamesah, D. J., 1995, *Sistem Adminstrasi Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Manurung, Mardin,2004. *Kajian Empiris Pengelolaan Anggaran Belanja Pembangunan(Proyek) Di Kota Jayapura*. Hal. 241-254.
- Mardiasmo, 2002. *Ekonomi & Manajemen Keuangan Daerah* . Penerbit ANDI Yogyakarta.

- Miller, Stephen M. And Frank S. Susek, (2000). “*Fiscal Structure and Economics Growth at The State and Local Level*” *Public Finance Review*, Vol 25 No. 213-237.
- Nachrowi D dan Hardius, (2006). *Ekonomitrika (pendekatan populer dan praktis)*. Penerbit FE- UI Jakarta.
- Nataludin, 2004. *Potensi Dana Perimbangan Pada Penerimaan Daerah Di Propinsi Jambi*. UPP AMP YNPN Yogyakarta. Hal 187-199.
- Nick Devas dkk, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta. Cetakan Pertama.
- Riwukaho, Yosef, 1997. *Prospek Otonomi Daerah Di Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali Press, Jakarta.
- Reksohadiprodjo, sukanto, 2001. *Ekonom Publik*. Penerbit BPFU UGM – Yogyakarta. Edisi Pertama.
- Sidik, Machfud, 2002. *Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah. Dalam Seminar Nasional ” Menciptakan Good Governance Demi Mendukung Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal*.
- Simanjuntak, Thamrin, (2004). *Analisis Pendapatan Asli Daerah*. Penerbit (UPP) AMP YNPN Yogyakarta. Hal 91-104.
- Sum, Muhamad, (2004). *Akuntansi Sebagai Suatu Sistem Dalam Penyusunan APBD*. Penerbit (UPP) AMP YNPN Yogyakarta. Hal 265-275.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sumber-sumber Penerimaan Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Widiarto, Wahyu, 2006. *Kewajiban dan Hak Antara Pusat Dengan Daerah Tidak Seimbang*. Penerbit BPFU-Yogyakarta.
- Widodo, (2004), *Analisa Rasio Keuangan Pada APBD*. Penerbit (UPP) AMP YNPN Yogyakarta. Hal 281-292
- Yunasman, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Suatu Tinjauan*. Penerbit (UPP) AMP YNPN Yogyakarta. Hal 1-12
- Yuliati, 2004. *Analisa Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah (Kasus Kabupaten Malang)*. Penerbit (UPP) AMP YNPN Yogyakarta. Hal. 21-32.